

**PERAN FATAYAT NU DALAM GERAKAN LITERASI POLITIK PADA  
PEMILU 2024 DI KABUPATEN SUMENEP**

***THE ROLE OF NU FATAYAT IN THE POLITICAL LITERACY  
MOVEMENT IN THE 2024 ELECTION IN SUMENEP REGENCY***

Oleh:

A Rifki Junaidi<sup>1)</sup>, Dwi Listia Rika Tini<sup>2)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja

E-mail: [arifkijunaidi@gmail.com](mailto:arifkijunaidi@gmail.com)

**Abstract**

*Politics is one of the instruments for creating a prosperous and just life, apart from that, the roles of men and women must have strong synergy to create policies that do not discriminate against either party. Apart from that, women's representation in the executive and legislative branches is still minimal. This shows that women's participation in the political sector is still low. So, from cases that occur in the field, many questions and problems will arise. One of them is related to the role of social organizations (fatayat NU). The aim of this research is to determine the role of NU fatayats in political activities in Sumenep district. The methodology in this research uses descriptive qualitative research methods. The data analysis technique used is data collection through observation, interviews, documentation, data reduction, data presentation and drawing conclusions. This political literacy movement was carried out as an effort to provide political understanding to the public in order to create elections that have credibility, thereby creating a dignified democracy. This political literacy movement is able to produce political communicators in society, this has an impact on accelerating the grounding of political understanding in society so that this will create a politically literate society. This has an impact on increasing public participation in election contestation*

**Key words:** *fatayat, political literacy, political communicator, participation,*

**Abstrak**

Politik adalah salah satu instrument menciptakan kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan, terlepas dari itu, peran laki-laki dan perempuan harus memiliki sinergi yang kuat untuk menciptakan kebijakan yang tidak mendiskriminasi salah satu pihak.. Selain itu, keterwakilan perempuan dalam eksekutif dan legislatif masih minim. Hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor politik. Maka dari kasus yang terjadi di lapangan maka akan banyak menimbulkan beberapa pertanyaan dan permasalahan. Salah satunya terkait peran organisasi kemasyarakatan (fatayat NU). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran fatayat NU dalam kegiatan politik di kabupaten Sumenep. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Gerakan literasi politik ini dilakukan sebagai salah satu usaha untuk memberikan pemahaman politik kepada publik untuk menciptakan pemilu yang

memiliki kredibilitas, sehingga terciptalah demokrasi yang bermartabat. Gerakan literasi politik ini mampu melahirkan komunikator politik di masyarakat, hal ini berdampak pada percepatan membumikan pemahaman politik di masyarakat sehingga hal tersebut akan menciptakan masyarakat yang melek politik. Hal ini berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kontestasi pemilu.

**Kata kunci: fatayat, literasi politik, komunikator politik, partisipasi,**

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam konteks demokrasi, suara rakyat adalah suara tuhan dan bukan sebaliknya (Dara & Rahila, 2023) jika ditelaah lebih dalam kekuasaan berada ditangan rakyat dan rakyat pula pemegang kedaulatan, sedangkan pemimpin adalah orang yang diberi amanat sebagai pelakasaan kekuasaan. Demokrasi menjadi ikhtiar agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan mampu menganbil keputusan yang diharapkan dapat mengubah kehidupannya, demokrasi juga menginginkan masyarakat ikut serta dalam persetujuan merumuskan segala bentuk kebijakan baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui wakil rakyat. Demokrasi juga menginginkan rakyat untuk ikut dalam memerintah dengan prantara wakil rakyat.

Demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditentukan dari diagendakannya pemilu yang secara regular dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, tetapi juga bisa dilihat dari keadilan

subtantif demokrasi, bagaimana demokrasi kita bisa memastikan kelompok-kelompok marginal memiliki hak yang sama dalam proses politik sektoral (pemilu) maupun tata kehidupan demokrasi (Fatin, 2022) Hukum positif di Indonesia mengatur secara tegas untuk memberikan akses pada perempuan agar semakin terlibat dalam politik. Undang-undang pemilu No, 12 Tahun 2003 merupakan bukti dengan adanya alokasi minimum sebesar 30%. Ini bisa dilihat dalam pasal 65, ayat 1, yang berbunyi: “Setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.”. selain itu, peran perempuan dalam politik tidak hanya ada di legislatif, tetapi perempuan bisa jadi aktor dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu di komisi pemilihan

umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (Fatin, 2022)

Keberadaan perempuan dalam dunia politik praktis yang telah dibuktikan melalui keterwakilan perempuan di parlemen merupakan syarat mutlak untuk pengambilan suatu keputusan atau pun kebijakan yang ramah dan sensitif pada kepentingan kaum perempuan itu sendiri. Tanpa adanya keterwakilan perempuan di parlemen yang memiliki jumlah memadai akan mengakibatkan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan oleh karenanya sangat penting perempuan harus aktif di dunia politik dalam rangka memperjuangkan masa depan perempuan dan mengembangkan potensi kaum perempuan (Kiftiyah, 2019)

Kiprah dan partisipasi kaum perempuan dalam ranah politik diharapkan mampu menghasilkan kebijakan dan keputusan politik yang di ambil memberikan keadilan dalam memperhatikan kebutuhan dan hak perempuan (Priandi & Roisah, 2019) Upaya pemberdayaan perempuan untuk dilakukan dengan memberikan kesempatan melalui tanggung jawab dalam pelaksanaan program kerja sebagai upaya dalam mendukung optimalisasi potensi-

potensi sumber daya manusia perempuan dalam menghadapi persaingan dunia. Di dalam era emansipasi saat ini, perempuan memiliki peranan yang sangat besar, baik sebagai pribadi, istri, ibu, maupun warga Negara yang berkewajiban mendidik generasi penerus bangsa. Perempuan memiliki kekuatan sebagai pondasi utama dalam menunjang pembangunan bangsa. Hal ini terlihat perempuan yang tidak hanya terbatas pada ranah sosial, tetapi juga sampai pada ranah politik (Farin, 2021).

Pertarungan politik baik di dunia maya maupun di dunia nyata harus dibarengi dengan pemahaman literasi politik agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk kepentingan politiknya, literasi politik menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang melek politik, utamanya kaum generasi milenial sebagai pemilih pemula. (Syahputra, 2020).

Tindakan afirmatif dengan pemberian kuota 30% bagi kaum perempuan merupakan hak konstitusional yang harus dipandang dengan proporsional. Namun kuota minimum yang sudah dijamin masih juga belum terpenuhi. Di DPR-RI saja pada pemilu 2019 tingkat

keterwakilan perempuan dalam legislatif baru menyentuh angka 20,8% atau 120 perempuan yang ada di anggota legislatif dari 575 anggota DPR RI. Hal ini menunjukkan ketimpangan tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam ranah politik nasional. Di kabupaten Sumenep sendiri keterwakilan perempuan dalam legislatif baru menyentuh di angka 8%. Dari 50 anggota DPRD Sumenep baru 4 yang diwakili oleh perempuan. Harusnya perempuan harus ikut andil dan berperan aktif dalam dunia politik agar mereka bisa menyuarakan hak dan masa depan perempuan.

Dari berbagai permasalahan yang peneliti temukan di lapangan, termasuk keterwakilan kouta 30% perempuan dalam legislatif, jebakan paternalistik pada perempuan yang menganggap perempuan lebih layak bekerja di sektor domestik dan masih adanya angka golput (hak pilih yang tidak digunakan) maka penulis sangat tertarik untuk meneliti **“peran Fatayat NU dalam gerakan literasi politik pada pemilu 2024 di kabupaten Sumenep”**.

TINJAUAN TEORITIS

### **Administrasi Publik**

Menurut Nicholas Henry (1988) dalam (Pasolong, 2019),

mendefinisikan administrasi public adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan public agar lebih responsive terhadap kebutuhan publik.

Chandler & Plano dalam (Pasolong, 2019) mengatakan bahwa administrasi publik merupakan proses dimana sumber daya dan personel public diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan,,mengimplimentasikan dan mengelola keputusan kebijakan publik. Dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur publik affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

### **Teori Peran**

Peran secara etimologi berarti seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Ini berarti setiap individu yang melakukan tindakan memiliki arti penting untuk

seagian masyarakat. Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015:224) bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.

teori peran Menurut Biddle & Thomas, 1956 dalam *ROLE PROBLEMS OF OFFENDERS AND CORRECTIONAL WORKERS*, Sage Journals, Vol.12, 1956 hal 354-364. (J. Thomas, 1956) menggolongkan peran menjadi 4 dimensi, yaitu;

1. peran kebijakan
  2. peran sebagai kapasitas strategis
  3. peran sebagai media atau alat komunikasi
  4. peran dalam menyelesaikan konflik
- Teori Biddle dan Thomas tersebut melihat peran atau peranan seseorang dari harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, norma, wujud perilaku, pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan terhadap peran dimaksud.

Berry sebagaimana dikutip Wirutomo (1981: 99-101) berpendapat bahwa peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya.

Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

### **Teori Gender**

Dalam pengetahuan tentang gender terdapat banyak teori yang berkembang dan dijadikan rujukan dalam menganalisis permasalahan gender. Teori-teori yang dimaksud adalah *nurture*, *equilibrium*, merupakan teori awal tentang gender (Handayani, 2006:6)

Teori Nature adalah teori yang mengadaikan bahwa peran laki-laki dan perempuan, merupakan peran yang telah digariskan oleh alam. Munculnya teori ini, bias dikatakan diilhami oleh sejumlah teori filsafat sejak era kuno. Dalam konteks filsafat Yunani Kuno misalnya, dinyatakan bahwa alam dikonseptualisasikan dalam pertentangan kosmik yang kembar, misalnya; siang - malam, baik - buruk, kesimbangan-perubahan, terbatas- tanpa batas, basah-kering, tunggal-ganda, terang-gelap, akal-perasaan, jiwa-raga, laki-

perempuan, dan seterusnya. Dengan demikian, ada dua identitas yang selalu berlawanan, yang berada pada titik eksistensial yang asimetris dan tidak berimbang. Dalam hal ini, kelompok pertama selalu dikonotasikan secara positif dan dikaitkan dengan laki-laki, sementara kelompok kedua berkonotasi negatif yang selalu dikaitkan dengan perempuan.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif penggunaan metode tersebut didasarkan pada tujuan utama penelitian yang ingin menggali peran fatayat NU dalam gerakan literasi politik pada pemilu 2024 di kabupaten Sumenep. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari kegiatan observasi dan wawancara dari beberapa informan dalam penelitian, data sekunder berupa data dari sumber literature terdahulu. Teknik analisis data melalui 3 tahap; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Pendidikan politik merupakan porses pembelajaran dan pemahaman hak, kewajiban dan tanggung jawab warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan

politik adalah suatu ikhtiar yang dilakukan seorang yang mana dilakukan secara sadar dalam proses penyampaian kebiasaan politik bangsa dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila (Rahman dan Suharno, 2020).

pendidikan politik juga bisa dimaknai sebagai materi pelatihan serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia melalui proses dialog yang dilakukan oleh pemberi dan penerima peran secara rutin, harapannya penerima pesan dapat memilih kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Sehingga pendidikan politik bagi masyarakat haruslah beranjak dari hal-hal yang paling mendasar, memaknai demokrasi, otonomi politik perempuan dan toleransi. Pada akhirnya pendidikan politik bagi pemilih adalah untuk meningkatkan pendidikan moral pemilih, dalam konteks yang lebih luas pendidikan politik jangan sampai terkesan mendikte pemilih dalam memutuskan pilihannya (Rahmaini, 2022)

## **Peran Sebagai kebijakan**

Pada dasarnya Fatayat NU adalah sebuah organisasi perempuan muda Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam sosial keagamaan, mengkaji isu-isu sosial, gender dan juga kajian kajian

keagamaan yang secara masif dilakukan di kepengurusan mulai dari cabang sampai pada pengurus ranting yang berada dalam naungan pengurus cabang fatayat NU Sumenep. Namun belakangan ini fatayat NU juga sering ikut mengambil bagian di ranah politik, termasuk menjadi partner BAWASLU dalam setiap moment pesta demokrasi, mensosialisasikan pemilu dan memberikan pendidikan politik perempuan yang dikemas dalam berbagai program kerja pengurus cabang fatayat NU kabupaten Sumenep.

Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Anderson , 1979). Pengurus cabang fatayat NU Sumenep menyadari pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat khususnya perempuan muda nahdlatul ulama dan ikut menampakkan eksistensi perempuan dalam pesta demokrasi. Walaupun demikian pengurus cabang fatayat NU Sumenep tidak pernah mewajibkan kepada pengurus anak cabang yang berada dalam naungan PC fatayat NU sumenep terkait dengan gerakan literasi politik, artinya PAC fatayat NU tidak dituntut untuk melakukan pendidikan politik kepada

kader-kadernya. Akan tetapi, ada beberapa pengurus anak cabang fatayat yang sudah melakukan pendidikan politik.

Kiprah dan partisipasi kaum perempuan dalam ranah politik diharapkan mampu menghasilkan kebijakan dan keputusan politik yang diambil memberikan keadilan dalam memperhatikan kebutuhan dan hak perempuan (Priandi & Roisah, 2019). emansipasi perempuan dalam dunia politik akan memberikan idea dan masukan yang baik dalam proses pengambilan keputusan suatu peraturan perundang-undangan terkait kebutuhan perempuan itu sendiri, karena perempuan mengetahui kebutuhan khusus yang hanya dipahami oleh perempuan (Priandi & Roisah, 2019).

Dalam program kerja ini, gerakan literasi politik bukan hanya semata mata ingin menyebarluaskan pemahaman politik di masyarakat. Tetapi ini adalah gerakan untuk mengembangkan kapasitas perempuan yang selama ini mengalami ketimpangan. Perempuan selalu dinomorduakan dalam urusan-urusan sosial dan politik, perempuan dipandang lebih layak bekerja di sector *domestik*, sebagai ibu rumah tangga. Pemberdayaan perempuan yang selama ini diperjuangkan oleh

fatayat NU diharapkan menjadikan perempuan sebagai sekolah pertama bagi keluarga mereka dan juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam konteks sosial. Sehingga eksistensi perempuan tidak hanya sebatas menjadi ibu rumah tangga.

#### **Peran Sebagai Kapasitas Strategis**

Fatayat NU menjadi partner KPU dalam memberikan pendidikan politik terutama kepada masyarakat secara umum, khususnya kepada pemilih pemula yang belum paham terkait tentang politik dan pemilu, oleh karenanya fatayat NU berserta KPU dan BAWASLU kabupaten Sumenep melakukan beberapa event pendidikan politik seperti talkshow pendidikan politik perempuan yang gencar dilakukan pra pemilihan serentak 2024. Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan pemahaman pemahaman dasar tentang politik dan pemilu. Pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk bergerak ikut ambil bagian dalam pemilu. Dalam strategi pendidikan politik partai selaku peserta pemilu memiliki strategi masing-masing pada saat bersosialisasi mengingat partai-partai yang ada di Indonesia jumlah nya beragam dan partai tentunya dituntut

untuk memberikan pemahaman semenarik mungkin guna agar bisa dipahami dengan baik bagi calon pemilih pemilih (Lestari dan Arum Sari, 2018). Oleh karenanya dalam event pendidikan politik yang diadakan oleh Fatayat NU Sumenep selalu menggandeng partai-partai untuk memberikan pemahaman yang mendalam yang didapatkan langsung dari orang yang memang memiliki kemampuan di bidang itu.

Seperti yang dikatakan oleh Maran (2001:135-136) tentang agen sosialisasi politik, bahwa keluarga merupakan salah satu agen pendidikan politik yang penting. Keluarga dapat dikatakan sebagai sumber informasi politik. Karena dalam keluarga sering terjadi diskusi yang dapat sangat membantu meningkatkan pendidikan politik para generasi muda. Massa besar yang dimiliki oleh fatayat NU Sumenep menjadikan percepatan penyebaran pemahaman-pemahaman politik di masyarakat, kader fatayat NU yang sudah menerima atau mengikuti event tersebut akan kembali menyampaikan di lingkungan sekitar mereka, misal dalam lingkup keluarga, kerabat dan orang-orang terdekat mereka. Masyarakat memiliki peran penting dalam politik, mengingat politik diadakan untuk kemajuan bangsa. Tahun politik tidak

hanya menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara politik tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya fatayat NU Sumenep tidak menutup diri untuk mengambil bagian dalam perhelatan pesta demokrasi. Pengurus cabang fatayat NU Sumenep membuka selebar lebarnya pintu untuk pemerintah mengandeng fatayat dalam berbagai kegiatan pemilu guna untuk memberikan pendidikan politik dan ikut serta memsosialisasikan pemilu kepada publik.

#### **Peran Sebagai Media dan Alat Komunikasi**

Event gerakan literasi politik yang dilakukan oleh fatayat NU Sumenep menjadi ruang terbuka untuk public menimbah dan mempelajari materi-materi politik, masyarakat atau kader fatayat sendiri yang mengikuti event gerakan literasi politik tersebut akan memprakarsai penyampaian suatu pesan berikutnya. Maka pada saat itu pihak yang tadinya sebagai khalayak sudah berubah peran menjadi komuikator. Dalam komunikasi politik khalayak yang menerima pesan-pesan politik adalah khalayak politik. Jadi dengan berita dan informasi yang mempunyai muatan politik dalam bentuk apapun adalah khalayak politik. Khalayak politik juga dapat berubah

menjadi komunikator politik dalam situasi dan kepentingan tertentu.

Semakin banyak kader fatayat ataupun masyarakat yang mengikuti event tersebut maka akan semakin banyak pula komunikator-komunikator baru yang akan menyampaikan pengetahuan politik kepada masyarakat secara luas, pengembangan literasi politik yang baik menjadi vital keberadaanya dalam konteks pembangunan kualitas hidup secara demokratis dalam berbangsa dan bernegara. Pengembangan literasi politik melalui struktur pembentukan dan pengembangan sosialisasi dan edukasi yang memadai dalam konteks sosial politik maka publik secara komprehensif akan memahami kedudukannya sebagai warga Negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Hal tersebut akan berdampak terhadap timbulnya kesadaran yang otonom dalam partisipasi pembangunan politik dan demokrasi yang bermutu khususnya di kabupaten Sumenep.

Gerakan literasi fatayat NU Sumenep yang dilakukan secara menyeluruh dari pengurus cabang hingga pengurus ranting memiliki efek besar dan dengan cepat menyebar di masyarakat, pemahaman yang diterima oleh masyarakat akan menjadikan

masyarakat yang lebih rasional dalam memilih dan yang terpenting partisipasi masyarakat dalam pemilu semakin meningkat.

#### **Peran Sebagai Penyelesaian Konflik**

Tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator suksesnya pemilu dan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan terus melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dari semua lapisan, masyarakat yang kurang paham politik dan apatis dalam kegiatan politik akan menjadi bagian dari golongan putih(golput). Maka dari itu, salah satu upaya menekan tingkat golongan putih adalah dengan diadakannya pendidikan politik kepada masyarakat.

Persentase pemilih muda hari ini menyentuh angka 40% lebih pada pemilu 2024 maka dari itu, salah satu upaya menekan angka golongan putih adalah dengan diadakannya pendidikan politik kepada calon pemilih muda. Mereka adalah generasi yang patut diberikan pendidikan sebelum pesta demokrasi agar menjadi generasi yang melek politik dan situasi politik di tahun 2024. Di sisi lain, penguatan pendidikan politik juga dimaksudkan agar pemilih muda tidak hanya menjadi objek politik tetapi juga

berperan sebagai subjek politik.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti telah melakukan pembahasan secara empiris pada data-data yang didapatkan dihadapkan pada teori peran Thomas & Biddle (1956) akhirnya didapatkan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Peran sebagai kebijakan, gerakan literasi politik yang dilakukan oleh fatayat NU kabupaten Sumenep merupakan gerakan untuk membumikan pemahaman politik dan kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk menciptakan pemilu yang bersih. Namun dalam perjalanannya, pengurus cabang fatayat NU Sumenep tidak pernah mengeluarkan kebijakan wajibnya kegiatan ini untuk dilaksanakan di tingkatan pengurus anak cabang, pengurus ranting dan anak ranting. Tetapi pengurus cabang juga tidak membatasi kepada seluruh pengurus anak cabang untuk mengambil peran dalam membumikan pemahaman politik di masyarakat, termasuk menjadi partner BAWASLU,

KPU dll

- b. Peran sebagai kapasitas strategis, Fatayat NU Sumenep memiliki massa yang besar, maka dalam setiap kegiatannya juga secara otomatis memiliki efek yang besar pula. Gerakan kecil dimulai dari keluarga kader masing-masing suatu saat akan menjelma menjadi gerakan besar dari masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang melek politik, dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat dalam politik tentu juga akan mengalami peningkatan.
- c. Peran sebagai media dan alat komunikasi, setiap event yang dilaksanakan fatayat NU Sumenep selalu dibuka untuk umum, hal demikian menjadikan event gerakan literasi politik sebagai sarana berbagi ilmu dan mengalih ilmu bagi kader dan masyarakat, tidak hanya mengkaji dan mempelajari ilmu- ilmu keagamaan tetapi juga ilmu sosial dan politik.
- d. Peran sebagai penyelesaian konflik, Gerakan literasi politik merupakan investasi di dunia politik untuk menciptakan

politik yang bersih, jujur dan adil. Tentunya hal tersebut bisa dilakukan melalui masyarakat yang memiliki pemahaman dasar tentang politik, meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam politik merupakan bukti nyata keberhasilan gerakan literasi politik yang dilakukan oleh fatayat NU Sumenep.

#### **Saran**

Dalam upaya lebih memaksimalkan penyebaran pemahaman politik di masyarakat seharusnya pengurus cabang fatayat NU Sumenep membuat kebijakan atau mewajibkan gerakan literasi politik kepada seluruh pengurus anak cabang fatayat NU yang berada dalam nuangan pengurus cabang fatayat NU Sumenep. Tentunya hal ini akan mempercepat menciptakan masyarakat yang melek politik.

Lahirya komunikator-komunikator politik baru di masyarakat tentu akan mempercepat laju perkembangan pemahaman politik yang nantinya memiliki pengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihan, menolak politik uang dan meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam kegiatan-  
kegiatan politik di kabupaten

Sumenep. **Daftar Pustaka**

Dara, C., & Rahila, I. (2023). *Jurnal Pengabdian Masyarakat ( JPMA ) 1 Januari - Juni*. 3(1), 14–18.

Fatin, N. (2022). Perempuan Pengawal Demokrasi : Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Kepemiluan di Indonesia. *Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 159–170.

Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>

Syahputra, muhammad C. (2020). Gerakan Literasi Politik Perempuan Nahdlatul Ulama Dalam Menyambut Pemilihan Umum 2019-2020. *Jurnal Islam Nusantara*, 04(02), 203–219.  
<https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.216>

Dimas Alfarisyi, M., Al Hasani, N., Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, P., Keguruan dan Ilmu Pendidikan, F., & Jambi, U. (2023). *Jurnal Politikom Indonesiana*:

Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Melalui Pendidikan Demokrasi Siti Tiara Maulia. *Ilmu Politik Dan Ilmu Komunikasi*, 8(1), 60–68.

<https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesia><https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesia>

[rnal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesia](https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesia)

Syahputra, muhammad C. (2020). Gerakan Literasi Politik Perempuan Nahdlatul Ulama Dalam Menyambut Pemilihan Umum 2019-2020. *Jurnal Islam Nusantara*, 04(02), 203–219.  
<https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.216>

Rosit, M., Handa, M. S., & Handayani, S. (2023). Penguatan Literasi Politik Warga Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024. *Innovative: Journal Of Social ...*, 3, 1078–1088.  
<http://j->

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Sutopo (ed.); 1st ed.). ALFABETA

Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D

(Sutopo (ed.); 1st ed.).  
ALFABETA

Crick (2021) konsep gerakan literasi politik. Essays on Citizenship, *Journal Of Social ...*, 3, 1078–1088.

J. Thomas. (1956). Role Problems of Offenders and Correctional Workers \* ~ E. *Sage Journals*, 12(4), 354–364.  
<https://doi.org/10.1177/001112876601200407>